

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 didasarkan pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi tanggal 25 Mei 2011 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012. Sedangkan hari pemungutan suara ditetapkan tanggal 11 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012.

Sebagaimana yang terdapat dalam perubahan pada 1 Juni 2016 lalu telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain bahwa partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota merupakan partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan dalam partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemilukada, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilukada dalam pelaksanaan demokrasi dan bagi kehidupannya sebagai warga negara pada umumnya.

Metode kegiatan sosialisasi yaitu dengan penyampaian pengetahuan mengenai tahapan dan program penyelenggaraan pemilukada kepada masyarakat, melakukan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan pemahaman pemilih serta menyebarluaskan informasi tentang mengapa, untuk apa, dan bagaimana Pemilukada diselenggarakan. Metode lain dilakukan melalui media massa baik media elektronik, media cetak, tradisional, dan media khusus seperti website/internet. Selain itu KPU kabupaten Bekasi juga merumuskan strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi lokal.

Tabel 1.1**Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Ditingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Dan Tahun 2012**

No	URAIAN	HASIL AKHIR 2007	HASIL AKHIR 2012	KETERANGAN
1	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)	1.652.243	1.751.951	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) meningkat
2	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	1.011.018	1.109.851	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih meningkat
3	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	641.225	642.100	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih menurun namun jumlahnya yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak diikuti dengan adanya perbandingan dan pada kenyataannya DPT tidak sebanding pada jumlah pemilih dan salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya.
4	Seluruh pasangan calon bupati, dalam surat suara sah	1.064.913	1.078.603	Seluruh pasangan calon bupati, dalam surat suara sah meningkat
5	Suara tidak sah	34.891	34.036	Suara tidak sah menurun
6	Jumlah suara sah dan tidak sah	1.099.804	1.112.639	Jumlah suara sah dan tidak sah meningkat

Sumber : Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi

Dalam tabel diatas, bahwa jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) meningkatkurang lebih 6% berdasarkan dari perhitungan daftar pemilih tetap dari periode tahun 2007 ke tahun 2012. Sedangkan dari jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih meningkat kurang lebih 9,775% serta di ikuti oleh jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih kurang lebih 0,432% namun jumlah pemilih dalam kenyataannya jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak diikuti dengan adanya perbandingan dan pada kenyataannya DPT tidak sebanding pada jumlah pemilih dan salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan Seluruh pasangan bupati dan wakil bupati surat suara sah meningkat serta diikuti dengan suara tidak sah menurun. Sedangkan jumlah dari suara sah dan tidak sah dari tahun 2007 ke tahun 2012 meningkat kurang lebih 2% .

Dilihat dari perbandingan jumlah pemilihan bupati dan wakil bupati pada periode tahun 2007 dan pada periode tahun 2012 meningkat, artinya pemilihan bupati dan wakil bupati antara periode ke-1 pada tahun 2007 dengan pemilihan bupati dan wakil bupati pada periode ke-2 pada tahun 2012, terdapat adanya peningkatan dan lebih baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan perhitungan jumlah dalam pemilihan daftar pemilih tetap (DPT) maka jumlah masyarakat yang banyak tidak menggunakan hak pilihnya yaitu terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Babelan, kecamatan Cikarang Selatan dan kecamatan Tambun Selatan. Berikut adalah tabel mengenai tiga kecamatan yang masyarakatnya banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Tabel. 1.2
Tiga Kecamatan Yang Masyarakatnya Kurang Berpartisipasi Terhadap
Pemilihan Bupati

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		DPT YANG MENGUNAKAN HAK PILIH		DPT YANG TIDAK MENGUNAKA N HAK PILIH	
		2007	2012	2007	2012	2007	2012
1	Babelan	145.271	145.429	55.903 %	57.273%	44.096 %	42.726 %
2	Cikarang Selatan	75.342	77.331	57.179 %	58.153%	42.820 %	41.968 %
3	Tambun Selatan	253.216	264.147	54.888 %	56.738%	45.111 %	43.261 %

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2007 dan tahun 2012, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih terbanyak yaitu terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Babelan pada tahun 2007 DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 55.903% dan tahun 2012 yaitu 57.273%, dan diikuti DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada tahun 2007 sebesar 44.096% dan pada tahun 2012 yaitu 42.726%. Sedangkan Kecamatan Cikarang Selatan yang menggunakan hak pilih sebesar 57.179% dan pada tahun 2012 yaitu 58.153%, dan diikuti DPT yang tidak menggunakan hak pilih yaitu sebesar 42.820% dan pada tahun 2012 yaitu 41.968%. Sedangkan Kecamatan Tambun Selatan DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 54.888% dan pada

tahun 2012 yaitu 56.738%, serta diikuti DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada tahun 2007 sebesar 45.111% dan pada tahun 2012 yaitu 43.261%.

Jadi pemilihan bupati pada periode tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007 dari jumlah pemilihan tetap, namun adanya persamaan pada ketiga kecamatan yang masyarakatnya kurang berpartisipasi yaitu kecamatan Babelan, kecamatan Cikarang Selatan dan Tambun Selatan. Jadi ketiga kecamatan ini dalam jumlah pemilihan tetap meningkat akan tetapi yang tidak menggunakan hak pilihnya dari tahun 2007 dan tahun 2012 tetap tidak meningkat, jadi ketiga jumlah yang tidak menggunakan hak pilih tetap konsisten dalam pemilihan bupati kabupaten Bekasi.

Akan tetapi tabel diatas tetap masih banyaknya masyarakat yang kurangnya partisipasi karena para lembaga penyelenggara kurang berupaya meningkatkan adanya suatu sosialisasi kepada masyarakatnya, bukan hanya kurangnya peningkatan partisipasi saja tetapi banyak pula masyarakat yang belum memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, contohnya seperti masih banyaknya warga yang belum mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pemilihan umum.

Pemerintah dan parlemen yang terbentuk melalui mekanisme demokrasi (pemilihan umum) memang tidak selalu ideal. Kadang rakyat harus menelan kekecewaan karena harapan-harapan mereka tidak/belum terwujud, kadang juga dipikul oleh kenyataan wakil-wakil mereka gagal merumuskan kebijakan yang pro-rakyat. Janji-janji yang diucapkan dalam kampanye pemilih mudah dilupakan menguap keangkasa dan diterbangkan angin entah kemana.

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Bekasi dalam pemilihan bupati yang masih perlu mendapat perhatian yaitu kurangnya partisipasi dalam pemilihan bupati pada periode tahun 2007 dan tahun 2012, kurangnya sosialisasi pada kecamatan Babelan, kecamatan Cikarang Selatan dan Tambun Selatan terbukti dari jumlah daftar pemilih tetap yang tidak menggunakan hak pilih.

Melihat kenyataan yang begitu beragam maka dibutuhkan kerja keras dalam melakukan sosialisasi tentang cara yang dilakukan dalam pemilihan langsung di Kabupaten Bekasi. Banyak yang menduga dari sekian banyak pemilihan langsung di Kabupaten Bekasi dengan cara pemilihan yang berubah-ubah akan terjadi banyak kesalahan dan masyarakat akan kesulitan dalam menandai pilihannya.

Meskipun demikian dari sekian banyak yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kabupaten Bekasi mulai dari pemilihan Bupati, Gubernur sampai ke Presiden, ternyata berjalan dengan lancar dan selalu mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Meskipun dalam tata cara pemilihan tersebut selalu mengalami perubahan ternyata masyarakat Kabupaten Bekasi begitu antusias dan mengikuti dengan penuh tanggung jawab. Tentu saja peran aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi dalam mensosialisasikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemilihan secara langsung di Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dengan hasil pemilihan secara

langsung. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pemilihan langsung. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalin koordinasi dengan ketua-ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari kecamatan sampai kelurahan. Selain itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kesuksesan dari sekian banyak pemilihan yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Maka penulis kembangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI POLITIK YANG DILAKUKAN KPUD KABUPATEN BEKASI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN BEKASI (STUDY KASUS PADA KECAMATAN BABELAN, CIKARANG SELATAN DAN TAMBUN SELATAN DI KABUPATEN BEKASI).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan identifikasi masalah yang dianggap menarik untuk diteliti, antara lain :

1. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan pemilihan umum pada pemilihan bupati pada periode tahun 2007 dan tahun 2012.
2. Kurangnya sosialisasi pada kecamatan Babelan, kecamatan Cikarang Selatan dan kecamatan Tambun Selatan terbukti dari jumlah daftar pemilihan tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih.
3. Terjadi pelanggaran waktu dan jadwal. Contoh ketika waktu dan jadwal sudah ditentukan masih banyak para pegawai yang melanggarnya,

misalkan waktu dan jadwalnya yang ditentukan sudah habis, para pegawainya masih ada terjadinya kampanye.

4. Kurangnya jadwal sosialisasi terhadap masyarakat, jadi pegawai KPU hanya memberikan waktu sedikit untuk berkampanye.
5. Banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya tahu akan pentingnya pemilihan dan beranggapan bahwa pemilu adalah hal yang biasa-biasa saja.
6. Penyampaian sosialisasi dan informasi masih kurang sempurna, ini terjadi dikarenakan banyaknya anggota yang sering terlambat untuk hadir dalam rapat, sehingga dalam penyampaian informasi hasil rapat tidak sepenuhnya disampaikan kepada penerima informasi.
7. Pegawainya kurang memberi arahan terhadap masyarakatnya.
8. Kurangnya memberikan motivasi/dorongan terhadap masyarakatnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dimensi imitasi sosialisasi terhadap partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bekasi ?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi intruksi sosialisasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bekasi ?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi motivasi sosialisasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat kabupaten Bekasi ?

4. Seberapa besar pengaruh dimensi imitasi, intruksi, dan motivasi terhadap partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti guna mengetahui dan mempelajari :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi imitasi sosialisasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi intruksi sosialisasi politik terhadap partisipasi politik di kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi motivasi sosialisasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat kabupaten Bekasi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi imitasi, intruksi, dan motivasi terhadap partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bekasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi keilmuan

dan secara akademis dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori kebijakan publik khususnya terkait pemilihan KPU.

- b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru lagi.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil study kebijakan public yang dikaitkan dengan pemilihan komisi pemilihan umum
- b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi negara serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam peneliti

1.6 Kerangka Penelitian

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (20013:7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Henry (1988) dalam Pasolong (20013:7) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsiv terhadap kebutuhan social.

Pendekatan penulis lakukan dalam melandasi penelitian ini, dengan mengkaji beberapa teori, adapun teori yang menjadi dasar penelitian ini penulis ambil dari Huntington dan Nelson (1998:241), dalam Gatara (2009:314), bahwa partisipasi politik masyarakat adalah adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. adapun bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat terdapat 5 dimensi yaitu sebagai berikut :

1 Kegiatan pemilihan (*electoral activity*)

Kegiatan pemilihan (*electoral activity*), mencakup menyumbangkan dana untuk kampanye dan pemberian suara, bekerja dalam suatu danapemilihan (seperti komisi pemilihan, pengawas ataupun pemantau), mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

2 Kegiatan *lobbying*

Kegiatan *lobbying* mencakup upaya-upaya perseorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3 Kegiatan organisasi (*organization activity*)

Kegiatan organisasi (*organization activity*), menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan implisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Jabatan dalam kegiatan politik tidak begitu berpengaruh dalam golongan partisipasi. Ini artinya semuanya, baik sebagai pejabat atau anggota biasa, memiliki kesempatan

yang sama. Hal itu sesuai dengan pandangan Huntington dan Nelson, yakni menjadi anggota biasa saja sudah menunjukkan elemen dari partisipasi politik sekalipun seseorang belum tentu terlibat secara langsung memengaruhi pemerintah.

4 Mencari Koneksi (*contacting*)

Mencari koneksi (*contacting*) merupakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat hanya bagi satu orang atau segelintir orang. Lebih jelasnya, bentuk ini merupakan partisipasi yang dilakukan warga negara secara langsung (baik mendatangi atau menelpon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan perseorangan atau kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. Biasanya bentuk seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut.

5 Tindakan Kekerasan (*violence*)

Tindakan kekerasan merupakan cara-cara untuk memengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan kedalam kategori partisipasi politik. Seperti yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson, bentuk partisipasi semacam ini ditempuh untuk memengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan kekerasan dengan barang atau individu.

Selain dari teori Huntington dan Nelson (1998:241), dalam Gatara (2009:314), sebagai dasar variabel Y, penulis pun menuntut teori tentang sosialisasi politik sebagai variabel X, Menurut Rush dan Althoff (1997:40) dalam Handoyo (2013:215), yaitu Ada tiga dimensi mekanisme sosialisasi yaitu :

1. Imitasi

Imitasi merupakan peniruan terhadap tingkahlaku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisai masa kanak-kanak. Pada masa remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi maupun motivasi. Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga dan lingkungan masyarakat. Imitasi tidak berlangsung secara otomatis melainkan dipengaruhi oleh sikap menerima dan mengagumi terhadap apa yang diimitasi. Untuk mengadakan imitasi atau meniru ada faktor psikologis lain yang berperan.

2. Instruksi

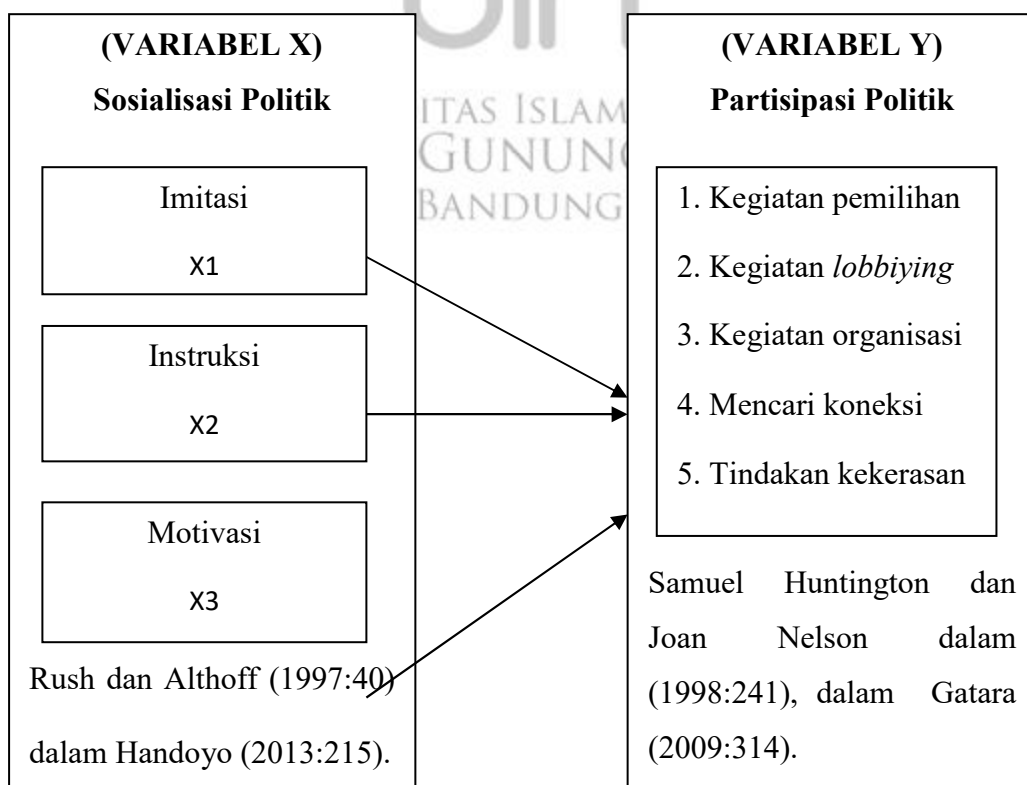
Instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri. Seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang instruktif sifatnya, dalam sifat instruktif membangun suatu kesadaran akan arti penting dalam sebuah politik, misalnya dalam beraneka tipe pendidikan kejuruan sambil bekerja dan beberapa diantaranya agaknya relevan dengan tingkahlaku politik. Dalam bersosialisasi arahan merupakan suatu yang penting, dalam tingkahlaku politik merupakan melakukan tingkahlaku politik dan warga negara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan hukum. Praktek dari beberapa organisasi atau kelompok-kelompok

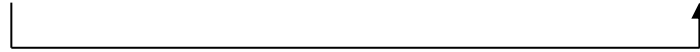
perorangan yang menjelma menjadi kelompok-kelompok diskusi merupakan tipe instruksi formal.

3. Motivasi

Motivasi sebagaimana dijelaskan bentuk tingkahlaku yang tepat cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial and error*). Individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan sama cocok dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapat individu contohnya seseorang akan mengetahui tentang politik jika adanya pendapat-pendapat dari individu dan itu bisa dari lingkungan, pergaulan dan lain-lain. Motivasi juga mempengaruhi perubahan yang terjadi pada dalam diri seseorang. Dalam pengalaman mengenai tindakan merupakan mengisi akal pikiran secara sadar akan pentingnya politik . Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep lahir dari pengamatan dan pengalaman mengenai berbagai macam hal yang berbeda dengan lingkungan individu tersebut. Dalam motivasi merupakan bentuk tingkahlaku yang tepat yang merupakan tingkahlaku yang tepat untuk mempelajari politik. Pengalaman mengenai tindakan untuk mengisi akan pikiran secara sadar. Semua itu terekam dalam otak dan sedikit diungkap individu melalui bentuk perilaku. Motivasi juga sebagai penggerak seseorang merupakan mengajak seseorang untuk berbuat atau bertindak dalam memahami politik. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang merupakan perubahan perilaku seseorang apabila stimulus tersebut dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Perilaku dilatarbelakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan.

Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman , sementara motivasi lebih banyak di identifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Pengalaman yang diperoleh individu dari berbagai metode tersebut merupakan variabel kunci dari model dimana tingkahlaku politik seseorang untuk sebagian ditentukan oleh banyaknya pengalaman. Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap seseorang jelas menunjang atau memberikan pengaruh terhadap pengalamannya. Dengan cara yang sama, proses transmisi dari pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap melalui bermacam-macam agen sosialisai semuanya merupakan bentuk pengalaman-pengalaman sendiri dan pada waktunya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sendiri dan pada waktunya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lainnya. Dengan demikian, pengalaman individu yang relevan secara politis muncul dari sosialisasi politik dan jelas memberikan kontribusi pada proses sosialisasi politik.





Gambar 1

Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:70) yang mengatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dala penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2011:77).

Hipotesis 1

Ho : Tidak ada pengaruh positif dimensi imitasi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Ha : Ada pengaruh yang positif dimensi imitasi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Hipotesis 2

Ho : Tidak ada pengaruh positif dimensi instruksi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Ha : Ada pengaruh positif dimensi instruksi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Hipotesis 3

Ho : Tidak ada pengaruh positif dimensi motivasi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Ha : Ada pengaruh positif dimensi motivasi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Hipotesis 4

Ho : Tidak ada pengaruh positif dimensi imitasi, instruksi dan motivasi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Ha : Ada pengaruh positif dimensi imitasi, instruksi dan motivasi secara simultan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bekasi.

